

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEDIA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH SECARA *E-PURCHASING***

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NUR RAGA SUKMA

NPM : 2174201001564

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEDIA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH SECARA *E-PURCHASING***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NUR RAGA SUKMA

NPM : 2174201001564

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 21 Januari 2025



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Humlati, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA DALAM
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
SECARA E-PURCHASING**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NUR RAGA SUKMA
NPM : 2174201001564

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 21 Januari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudha Irmal, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

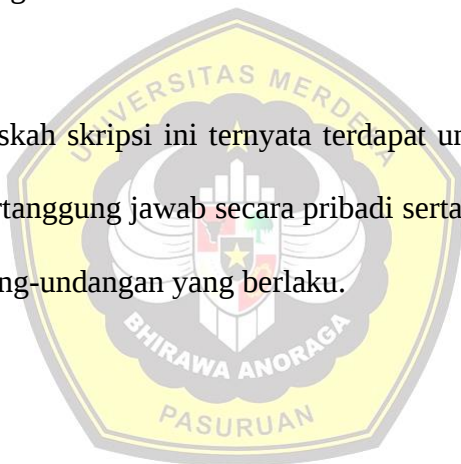
Berbagai penyimpangan dan kecurangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah baik itu dilakukan oleh penyedia maupun pihak konsumen. Berbagai bentuk kesalahan kerap sekali dilakukan baik oleh pejabat maupun pelaksana di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, misalnya korupsi. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana bila terbukti melanggar hukum pidana. Pentingnya mengetahui unsur tindak pidana yang terdapat dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna untuk penegakan hukum yang berkeadilan akibat adanya kerugian negara yang timbul karena adanya korupsi. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan hukumnya merupakan dasar pengenaan sanksi/hukuman terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tidak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses PBJ pemerintah harus memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya yang mencakup unsur subjektif yang meliputi adanya subjek dan kesalahan, serta terdapat unsur objektif yang meliputi perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu disertai dengan unsur tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada keuntungan pribadi serta kerugian negara yang timbul akibat adanya kecurangan dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah. Pengenaan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana juga diberlakukan kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan perundang-undangan.

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa, korupsi, pertanggungjawaban pidana.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasuruan, 21 Januari 2025
Penulis



NUR RAGA SUKMA
NPM. 2174201001564

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA E-PURCHASING.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kendala dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, kendala dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala dukungannya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dari kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Humiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini di tengah kesibukannya, dengan

membagikan ilmunya serta memberikan arahan, saran, nasihat, dan bimbingan dengan penuh kehati-hatian, kesabaran dan ketulusannya.

5. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang turut membantu memberikan semangat serta saran dan masukan positif kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis mengucapkan terima kasih atas semua atas bimbingan, pendidikan dan arahannya.
7. Kedua orang tua penulis yang dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
8. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan serta rekan-rekan kerja penulis di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh pembaca.

Pasuruan, 21 Januari 2025
Penulis

NUR RAGA SUKMA
NPM. 2174201001564

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
3. Unsur dan Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	15
4. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	

1. Pengertian dan Macam-Macam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	21
2. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	26
3. Tujuan dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	27
4. Aturan Hukum Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	32
C. Tinjauan Umum Tentang <i>e-Purchasing</i>	
1. Pengertian dan Manfaat <i>e-Purchasing</i>	33
2. Prinsip Hukum Dalam Pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> ..	37
3. Para Pihak dan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam <i>e-Purchasing</i>	38
4. Mekanisme Pelaksanaan <i>e-Purchasing</i>	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	45
B. Ruang Lingkup Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA E-PURCHASING	

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Bagi Penyedia Yang Melakukan Kecurangan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	51
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Yang Melakukan Kecurangan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara <i>E-Purchasing</i>	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Unsur Tindak Pidana	52
2 Unsur Tindak Pidana Korupsi	54

